

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A.4

TAHUN 2006

Kalla Kritik Amien

JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengkritik balik pihak-pihak yang menilai pemerintah telah menjual negara, seperti memberikan hak pengelolaan ladang minyak Blok Cepu ke ExxonMobil. Kerja sama dengan Exxon, kata dia, adalah bagi hasil dan peran kontraktor dijalankan Exxon.

"Kontraktor itu artinya kita menyuruh Exxon bekerja untuk Indonesia dan hasilnya dibagi untuk dua pihak. Apa dengan begitu kita menjual bangsa? Tidak bukan?" ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Golkar kemarin.

Dalam sarasehan mengingatkan Hari Kebangkitan Nasional, beberapa tokoh nasional yang dimotori mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mandiri dan tunduk pada kepentingan asing.

● OKTAMAHJAYA WIGUNA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|-----|--|------|------|-----|-----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | | | | | | <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS | | <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI | | | | <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| HALAMAN: 18 | | | | | | | | | | | TAHUN 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Didukung, Rencana "Class Action" ke Pertamina

INDRAMAYU, (PR).-

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendukung adanya rencana gugatan *class action* sejumlah LSM dan masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu terhadap Pertamina UP-VI atau Kilang Balongan. Hal itu terungkap saat Assdep Penataan dan Penegakan Hukum Perdata KLH turun ke Indramayu menemui sejumlah aktivis LSM untuk mengumpulkan data terkait rencana gugatan tersebut.

Informasi yang diperoleh "PR", Minggu (21/5), tim yang berjumlah lebih dari 5 orang, sejak Jumat pekan lalu sudah berada di Indramayu. Tim khusus tersebut dipimpin oleh Bambang Satria Jati, S.H., M.Si dari Deputi Penegakan Hukum Perdata KLH.

Hari-hari pertama tim khusus di Indramayu, bertemu dengan para kepala subdin di DPLH (Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup). Tim kemudian menyempatkan bertemu dengan sejumlah pimpinan LSM dari masyarakat pesisir. Di antaranya, LSM Siklus, Solid, LaKI, Gempuling, Kompi dan sejumlah unsur masyarakat pesisir.

"Kedatangan tim dari KLH untuk menindaklanjuti soal rencana *class action* dari unsur masyarakat Indramayu terhadap Kilang Balongan," ujar Ir. Oni Thoyib, dari Siklus.

Pada pertemuan dengan DPLH dan LSM, tim khusus KLH meminta sejumlah masukan. Terutama berkaitan dengan latar belakang kenapa muncul rencana *class action* sampai sejauhmana dampak terhadap lingkungan akibat keberadaan kilang.

Mulai minggu ini, tim khusus KLH juga akan meminta masukan ke sejumlah instansi terkait maupun masyarakat. Bahkan diagendakan pula bertemu langsung dengan pihak Pertamina UP-VI Balongan. "Tim akan menilai dari berbagai aspek. Supaya objektif, selain menemui masyarakat, juga akan menemui pihak Kilang Balongan," ujar Oni.

Advokasi gugatan

Salah seorang anggota tim khusus dari KLH, Ir. Nugraha menjelaskan, kedatangan timnya untuk mencari fakta objektif menyusul rencana gugatan *class action* dari masyarakat Indramayu. Bila nanti ditemukan fakta yang mendukung kemungki-

nan *class action* dilakukan, KLH akan melakukan pendampingan. "Jika faktanya mendukung, kami akan melakukan advokasi supaya *class action* bisa dilaksanakan," ujar dia.

Dijelaskan, rencana kerja timnya di Indramayu cukup lama. Pengumpulan data dan informasi seputar *class action* akan berlangsung sampai bulan Agustus 2006. "Bahkan bila pada saat itu ternyata fakta berkembang, kita bisa memperpanjang waktu. KLH ingin menemukan fakta seobjektif mungkin untuk menyelesaikan perkara lingkungan di Indramayu ini. Kedatangan kami menunjukkan kalau keresahan masyarakat diakomodasi dan memperoleh prioritas," kata Nugraha.

Seperti diketahui, sejumlah LSM dan masyarakat pesisir Indramayu berencana mengajukan *class action* ke Kilang Balongan. Hal itu terkait dengan terjadinya pencemaran laut sejak tahun 2002 yang berdampak pada menurunnya kualitas daya dukung perairan dan pesisir terhadap sektor perikanan dan pertambakan di daerah setempat. (A-93)***

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2006

HARGA MINYAK Ramalan Goldman Sachs Kemungkinan Meleset



Maizar Rahman

JAKARTA (Suara Karya): Perkiraan analis Platts Energy Economist dan perusahaan investasi AS Goldman Sachs yang menyebut harga minyak dunia bisa mencapai di atas 100 dolar AS kemungkinan meleset. "Faktor geopolitik memang berbahaya bagi harga minyak dunia. Namun ketinggian harga hanya akan bertahan sedikit di atas 70 dolar AS," kata Ketua Dewan Gubernur OPEC Maizar Rahman dalam percakapan dengan *Suara Karya* di Jakarta, Minggu.

Menurut Maizar, rata-rata harga minyak hingga akhir tahun 2006 hanya akan berkisar 64,4 dolar AS. Harga memang bergerak di atas 70 dolar AS. "Namun percayalah, dalam beberapa waktu mendatang ini bakal turun kembali," katanya.

Maizar menyebutkan, sejak tahun 2005 Goldman Sachs sudah memberikan prediksi tinggi mengenai harga minyak dunia ini. Namun, prediksi tersebut sulit dicapai. "Kalau ramalan tersebut benar, ekonomi dunia akan sangat terganggu," ujarnya.

Negara mana pun, menurut Maizar, pasti berkeinginan harga minyak dunia bisa stabil. Karena itu, semua negara -- termasuk OPEC -- akan berupaya menyetabilkan harga minyak ini agar tidak mengalami peningkatan hingga di luar batas seperti ramalan Goldman Sachs.

Maizar mengingatkan bahwa faktor geopolitik sukar diprediksi. Itu pula yang membuat harga minyak potensial bertahan pada level tinggi. Bila tidak ada penyelesaian atas faktor geopolitik, harga minyak yang tinggi ini sulit diturunkan. "Karena itu, kita berharap segera ada pendinginan atas faktor geopolitik supaya harga minyak bisa kembali stabil," ujar Maizar.

Iran, anggota OPEC yang kini menjadi faktor geopolitik terkait program nuklir yang mereka kembangkan, memang memiliki produksi besar, yaitu 4,2 juta barel per hari (bph). Namun demikian, kata Maizar, minyak yang diekspor Iran mencapai 2,5 juta bph.

Sebelumnya, sejumlah analis top di AS memperkirakan harga minyak segera menyentuh level 100 dolar AS per barel. Perkiraan berpijak pada persediaan minyak yang mereka lihat bakal kacau seiring peningkatan suhu geopolitik di beberapa negara.

Seperti dikutip *yahoo news* atas analisis Platts Energy Economist, akhir Mei lalu, perusahaan investasi asal AS, Goldman Sachs, menaikkan prediksi harga minyak hingga 105 dolar AS per barel. Peringatan Goldman yang dirilis di Wall Street ini beranjak dari pergerakan harga minyak belakangan ini yang melonjak tajam. Saat ini harga minyak di New York Mercantile Exchange (Nymex) untuk kontrak pengiriman bulanan rata-rata sudah di atas 65 dolar AS per barel. Harga minyak pernah menyentuh level tertinggi 75,35 dolar AS per barel pada 21 April 2006.

Proyeksi awal itu sendiri menggunakan asumsi seriusnya persediaan minyak yang membawa harga komoditas tersebut bergerak cepat ke level tertinggi.

Sebelum harga minyak di pasar mendekati level 75 dolar AS per barel, kombinasi sejumlah faktor memang mengganggu persediaan minyak dunia. Faktor tersebut adalah geopolitik tentang wacana program nuklir Iran.

Namun demikian, kata Maizar, harga harga minyak tinggi juga akan mempengaruhi inflasi, suku bunga, dan perdagangan dunia. Beberapa tahun ke depan, harga minyak masih tergantung pada masalah pasokan. Namun ketika harga minyak sangat bergejolak, itu akan menjadi magnet tinggi bagi pergerakan harga di pasar berjangka. "Saya tetap optimistis bahwa semua pihak akan menahan diri demi kestabilan harga minyak dunia," katanya. (Sabpri Pillang)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2006

121 Juta Tabung Gas

RENCANA pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke LPG, tampaknya bakal membawa banyak berkah. Bukan hanya bisa memangkas subsidi, dari Rp 30 triliun menjadi Rp 6 triliun. Lebih dari itu, para pengusaha juga bisa memanfaatkan tingginya kebutuhan akan tabung gas. Tjiptadi, Ketua Asosiasi Industri Tabung Baja (ASITAB), mengungkapkan, dalam tiga

asumsi harga tabung tersebut Rp 30 ribu, dana yang akan berputar ditaksir bisa mencapai Rp 3,6 triliun.

Nah, agar dana sebesar itu benar-benar bisa dinikmati pengusaha lokal, Tjiptadi meminta pemerintah untuk segera memberlakukan SNI (standar nasional Indonesia) untuk tabung ukuran 3 kg. Pasalnya, selama ini baru tabung ukuran 6, 9, 12, dan 50 kg yang memiliki SNI. Langkah ini diperlukan untuk melindungi pengusaha dari serbuan produk impor asal



TRUST/AMAM WAHYUDI

tahun ke depan, kebutuhan akan tabung gas diperkirakan mencapai 121 juta.

Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan sebesar itu bukan perkara mudah. Sebab, selama ini kapasitas produksi anggota ASITAB masih sangat kecil, sekitar 40 ribu unit per bulan. Itu sebabnya, untuk memenuhi kebutuhan tadi, mereka akan melakukan ekspansi usaha.

Menurut Tjiptadi, harga jual tabung selama ini cukup variatif. Untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, diperkirakan tabung berukuran 3 kg yang akan dipakai. Seandainya, 121 juta tabung tadi berukuran 3 kg, maka uang yang bakal berputar ke industri ini akan sangat melimpah. Dengan

Cina. "Kalau diimpor dengan legal yang berbea masuk 15%, saya kira kami bisa bersaing dengan produk impor," ujar Tjiptadi. □

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2006

DKI Jamin Keamanan Penggunaan BBG

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat tidak khawatir menggunakan bahan bakar gas (BBG), asalkan tetap memeriksa tangki BBG secara berkala setiap enam bulan sekali di bengkel.

"Kejadian meledaknya tabung BBG pada taksi beberapa waktu lalu karena tabungnya sudah 10 tahun tidak terawat dan tidak teruji," kata Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta Peni Susanti kepada *Investor Daily* di Jakarta, Minggu (21/5).

Menurut Peni, perawatan BBG tidak berbeda dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak (BBM). "Sebenarnya, bensin juga mudah terbakar, tetapi karena pemilik kendaraan sering memeriksanya di bengkel, makanya aman saja. BBG juga begitu," jelas dia.

Namun, Peni mengakui, beng-

kel BBG di Jakarta masih terbatas. Kondisi itu disebabkan peminatnya sedikit. Untuk itu, kata dia, pemerintah telah mencaangkan pemasyarakatan BBG pada Sabtu (20/5). Pemasyarakatan ini diharapkan merangsang bengkel melayani kendaraan ber-BBG.

Selain itu, pemasyarakatan yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut ditargetkan dapat menambah jumlah Stasiun Pengisian BBG (SPBG) di Jakarta.

Saat ini, kata Peni, terdapat 14 SPBG. Namun, hanya enam yang beroperasi di antaranya di Jalan Sumenep, Jalan Pemuda, Daan Mogot, dan Pasar Minggu. Sisanya delapan SPBG tidak beroperasi.

Namun, Pemprov DKI berjanji akan merevitalisasi kedelapan SPBG tersebut. Kedelapan SPBG itu ditargetkan dapat beroperasi

paling lama akhir 2006.

"Kami juga akan tekankan kembali SPBU untuk wajib sediakan BBG, termasuk SPBU asing, sehingga target penggunaan BBG pada kendaraan umum dan dinas hingga 2010 bisa te-

realisasi," tutur dia.

Untuk mendukung rencana itu, pemerintah pusat juga akan membantu. Pemerintah pusat akan menyediakan anggaran untuk membantu pembangunan SPBG di Jakarta.

"Pemerintah melalui Departemen Perhubungan juga akan mempromosikan 4.000 *converter kit* secara gratis kepada kendaraan umum, sehingga mempermudah akses pengisian BBG," ungkap Peni. (c81)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: " (

TAHUN 2006

Percepat Pembangunan SPBG

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan mempercepat pembangunan SPBG untuk mempermudah akses penggunaan BBG.

"Penggunaan BBG merupakan alternatif dari diversifikasi konversi energi yang telah dicanangkan pemerintah mulai 2006 hingga 2025 dan bertujuan untuk mengatasi konsumsi BBM yang semakin meningkat," kata SBY, saat pencaangan pemasyarakatan BBG di Pool Pengisian BBG Bus Transjakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Sabtu (20/5).

Selain murah, BBG dinilai hemat dan aman serta tidak menyebabkan polusi udara. BBG hanya dijual seharga Rp 3.000 per liter setara premium (LSP).

SBY mengimbau agar diperbanyak kendaraan yang menggunakan BBG, bengkel, dan suku cadangnya. Dia juga menekankan pada jaminan keamanan dan kenyamanan BBG pada kendaraan bermotor. SBY juga meminta harus ada standarisasi tabung gas dan akreditasi bengkel untuk kendaraan BBG, serta perlu sertifikasi bagi teknisi yang menangani kendaraan BBG. (e81)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2006

Anggaran BLT 2007 Tinggal Rp 4 Triliun

JAKARTA - Pemerintah berencana memangkas dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada APBN 2007 menjadi Rp 4 triliun saja. Pada APBN 2006, jumlah dana pengganti subsidi BBM itu mencapai Rp 17 triliun. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, jumlah dana BLT tahun ini akan bertambah Rp 1,8 triliun.

"Anggaran BLT pada 2007 lebih kecil dibandingkan 2006 karena polanya berbeda. Pola BLT sekarang tidak bersyarat, sedangkan pada 2007 sudah bersyarat," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di DPR Jakarta, Selasa (16/5) malam.

BLT bersyarat, kata Paskah, tidak lagi dibagikan kepada penduduk miskin yang besarnya sebesar Rp 100.000 per keluarga per bulan. BLT bersyarat dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. "Penyaluran BLT itu menyaratkan komitmen-komitmen yang harus dilakukan penerimanya. Penggunaan uang BLT harus dimanfaatkan dengan jelas oleh penerimanya. Prinsipnya, pemerintah masih ingin membantu rumah tangga miskin, tetapi polanya diubah agar lebih bermanfaat," katanya.

Dia mengatakan, jumlah rumah tangga miskin yang dibantu diperkirakan cuma 2-3 juta. "BLT bersyarat tidak bisa menampung semua rumah tangga miskin (yang menurut BPS, red) sebanyak Rp 19,2 juta. Walau begitu, BLT bersyarat 2007 harus memiliki nilai lebih, yakni berdampak lebih luas terhadap rumah tangga miskin. Teknis dan daerah mana saja yang bakal menjadi *pilot project*, masih dikaji," katanya.

Menurut Paskah, BLT tanpa syarat akan langsung dihentikan begitu penyaluran tahap IV selesai pada September 2006. "Kami hentikan dulu BLT bersyarat September mendatang. Setelah itu, kami laksanakan BLT bersyarat pada 2007," katanya.

Padahal, seperti diketahui, penyaluran BLT tahap III saja yang seyogyanya dimulai 1 April lalu hingga kini masih tersendat. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin menjadi 19,2 juta dari perkiraan sebelumnya 15,5 juta adalah salah satu penyebabnya. Penambahan jumlah rumah tangga miskin itu mengakibatkan pemerintah harus menambah anggaran (APBN) Rp 1,8 triliun menjadi Rp 18,8 triliun. Namun, penambahan itu nampaknya harus menunggu hasil APBN Perubahan 2006 terlebih dahulu yang akan dibahas pada semester II.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Emir Moeis menilai, BLT tanpa syarat sudah selayaknya dihentikan. "BLT tanpa syarat itu *kan* disusun karena pemerintah panik berkaitan dengan melambungnya harga minyak. Itu jelas proyek panik sehingga tak perlu dilanjutkan lagi," katanya.

Emir mengatakan, setiap bantuan pemerintah kelak seharusnya berdampak nyata bagi masyarakat miskin. "BLT sekarang *kan* tidak jelas digunakan untuk apa oleh penerimanya. Jangan ulangi lagi hal seperti itu," katanya. (c85)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

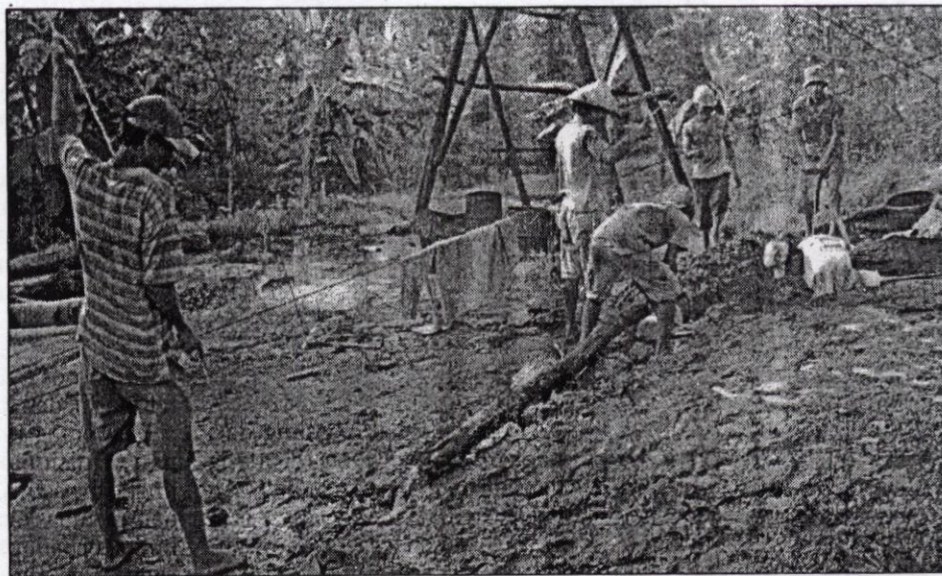
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006



MENCARI MINYAK - Para penambang minyak mentah tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jatim, Sabtu (20/5) mencari sumur minyak mentah baru yang terpendam tanah di kawasan tambang minyak peninggalan Belanda. Para penambang memperkirakan masih terdapat sumur minyak mentah yang tertimbun tanah berkedalaman 1-2 meter.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MET** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

RITEL UP-STREAM MIGAS

OilPods Tawarkan Investasi
di Lapangan Weesatche Texas

JAKARTA - Perusahaan Singapura OilPods International Inc menawarkan metode investasi di sektor hulu (*up stream*) minyak dan gas secara ritel. Lapangan migas yang ditawarkan berada di Texas, Amerika yang saat ini dikelola Powder River Basin Gas Corporation (PRVB).

"Yang ditawarkan kali ini kepada publik adalah *share working interest* untuk lapangan minyak Weesatche di Texas," papar OilPods Managing Director Mark Chang dalam OilPods Seminar 2006 di Jakarta, Sabtu (20/5).

Menurut dia, ini merupakan tender keenam, sesudah lima sumur di beberapa negara bagian di AS yakni Wyoming, Louisiana, Oklahoma telah terjual pada beberapa tahun terakhir. Mark mengatakan, nilai investasi bagi sumur di Texas mencapai US\$13 juta.

Pola investasi yang ditawarkan, kata Mark adalah penjualan bagian *share* dari *working interest* secara ritel dengan nilai modal US\$5.000 per unit. Investor diberi jaminan pengembalian modal (BEP) dalam jangka tiga tahun (dengan asumsi harga minyak dunia US\$40 per barel) serta pendapatan bulanan 1,5% per bulan dalam jangka minimal dua belas tahun.

President PRVB Brian Fox mengatakan, seluruh sumur migas yang dikelola Powder



Anwar Eddy Hartono

River tergolong ladang *onshore* yang rata-rata memiliki masa produksi hingga 20 tahun

Lapangan Weesatche yang berada di Goliad Country, Texas memiliki luas wilayah sekitar 2.500 acres dan memiliki 14 sumur gas dan 2 sumur minyak, dengan produksi masing-masing 300 mcf dan 185 barel per hari di setiap sumur. Persentase *interest* yang ditawarkan ke publik besarnya mencapai 24%.

PT Berkat Lestari menjadi perusahaan *marketing arms* dari OilPods International Inc. *Country Representative* PT Berkat Lestari Anwar Eddy Hartono mengatakan, pihaknya memusatkan kegiatan di Jakarta dan Surabaya untuk menjaring calon investor. "Sejauh ini, respons masyarakat cukup baik. Saya optimistis, bisnis ini akan terus berkembang karena memang sangat menguntungkan. Apalagi ada kecenderungan harga minyak terus meningkat," ujar dia.

Menurut Eddy, apabila mekanisme ini bisa diterapkan di wilayah kerja Indonesia, perusahaan negara seperti Pertamina tidak perlu kesulitan mencari dana untuk mengembangkan suatu wilayah migas. "Sayangnya, hukum di Indonesia sepertinya tidak memungkinkan hal itu," ujar dia. (es)

24

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

VOLUME BBM BERSUBSIDI DIKURANGI

2006, Harga BBM Tak Naik

JAKARTA – Pemerintah menjamin tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Namun, jumlah konsumsi BBM bersubsidi akan ditekan, antara lain dengan penggunaan bio-solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengakui, tingginya harga minyak mentah (*crude oil*) telah membengkakkan besaran subsidi dalam APBN 2006 dari Rp 54 triliun menjadi Rp 79 triliun. Ada dua alternatif untuk mengurangi subsidi, yakni menaikkan harga dan menurunkan volume. "Sekarang ini, pemerintah akan coba untuk tidak menaikkan harga. Implikasinya, volume pemakaian BBM ya harus diturunkan," ujar dia saat membuka peluncuran bio-solar Pertamina di Jakarta, Sabtu (20/5).

Sejak 1 Oktober 2005, pemerintah mematok harga BBM bersubsidi jenis premium Rp 4.500 per liter, solar Rp 4.300 per liter, dan minyak tanah Rp 2.000 per liter.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi berubah mengikuti harga minyak internasional. Untuk periode Mei 2006, harga BBM non-subsidi rata-rata naik 7,5% dibandingkan April 2006. Harga premium Rp 5.469 per liter, minyak tanah Rp 5.664 per liter, minyak diesel Rp 5.326 per liter, Pertamina Rp 5.800 per liter, dan Pertamina Plus Rp 6.050 per liter.

Untuk menghemat impor solar, Sabtu (20/5), Pertamina meluncurkan produk bio-solar. Produk yang dipasarkan Rp 4.300 per liter itu terdiri atas 5% CPO jenis *fatty acid methyl ester* (FAME) dan 95% solar murni bersubsidi. "Penjualan produk tersebut akan menghemat impor solar sebanyak 750.000 kiloliter per tahun," kata Dirut Perta-

mina Ari Hernanto Soemarno.

Pertamina adalah perintis dari pengembangan biodiesel di sektor transportasi. "Ini sangat bagus dan diharapkan bisa membantu program pemerintah dalam menurunkan volume pemakaian BBM bersubsidi," kata Purnomo.

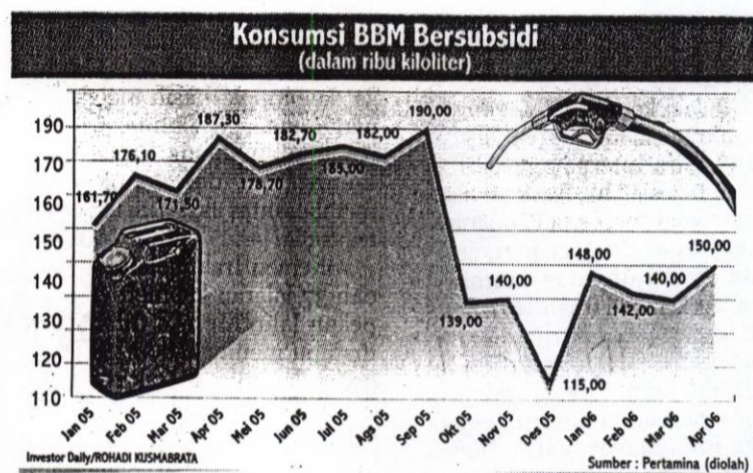
Untuk tahap awal, Pertamina akan menjual produk bio-solar di empat SPBU di Jakarta. Pertamina akan meningkatkan menjadi 10 SPBU hingga akhir tahun. Pada tahap awal, Pertamina baru akan menjual B-5, setelah itu meningkat ke B-10 dan B-15. "Kalau B-10 bisa hemat 1,5 juta kiloliter atau US\$ 500 juta," kata Achmad Faisal, direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina.

Turunkan Volume

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha menurunkan volume pemakaian BBM bersubsidi ketika menyusun kuota BBM bersubsidi untuk tahun ini.

"Yang dulunya 65 juta kiloliter, untuk tahun ini tinggal 40 juta (tepatnya 41 juta, red) kiloliter. Ini akan terus diupayakan untuk turun," papar Purnomo.

Untuk menurunkan volume pemakaian BBM, menurut Purnomo, pemerintah akan menggiatkan pengembangan energi alternatif seperti biodiesel, minyak jarak, bahan bakar gas (BBG), dan briket batu bara. "Ini akan mendukung strategi



Impor BBM Pertamina Juli 2005 - April 2006 (dalam juta barel)

| Tahun | Bulan | Impor |
|----------|-----------|----------|
| 2005 | Maret | - |
| | April | - |
| | Mei | - |
| | Juni | - |
| | Juli | 15,750 |
| | Agustus | 17,6 |
| | September | 16,7 |
| | Oktober | 15 |
| | November | 14 |
| | 2006 | Desember |
| Januari | | 8,2 |
| Februari | | 6,4 |
| Maret | | 6,4 |
| April | | 7,6 |
| Mei | | 7,4 |
| Juni | 7,4 - 7,9 | |

Sumber : Pertamina (diolah)

pemerintah untuk tidak perlu lagi menaikkan harga BBM," tegas dia.

Berdasarkan PP No 5 Tahun 2006, Pemerintah bercita-cita untuk menurunkan pemakaian BBM dari saat ini 55% menjadi 15-20% pada 2025.

"Dan sesuai Inpres No 1 Tahun 2006, pemerintah minta agar masyarakat aktif melakukan substitusia energi," kata Purnomo.

Namun, data yang diperoleh *Investor Daily* menunjukkan, pemerintah justru mengusulkan kenaikan kuota BBM bersubsidi 4,94% menjadi 43,63 juta kiloliter pada 2007 dibanding tahun ini 41,57 juta kiloliter. Penambahan kuota itu untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM jenis premium dan solar.

Usulan itu tertuang dalam Surat Depkeu No S-35/MK.2/2006 tentang Perkiraan Volume BBM Tahun Anggaran 2007 yang dipaparkan Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BP Migas) di hadapan Raker Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (18/5).

Dalam paparan itu, konsumsi premium 2007 naik 5% menjadi 17,93 juta kiloliter dari 17,08 juta kiloliter tahun 2006, solar naik 8,3% menjadi 15,698 juta kiloliter dari 14,49 juta kiloliter pada 2006, namun konsumsi minyak tanah tetap 10 juta kiloliter.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, kenaikan kuota premium telah mempertimbangkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor sebesar 5%.

Kenaikan itu juga mengacu adanya Perpres No 9 Tahun 2006 dan Permen 026 Tahun 2006 yang mengakomodasi kebutuhan solar untuk transportasi laut dan nelayan.

Tubagus menambahkan, perkiraan itu telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan pengalihan minyak tanah ke elpiji. "Pengalihan minyak tanah ke elpiji tidak menyebabkan kenaikan konsumsi minyak tanah," kata dia.

Tubagus menjelaskan, kenaikan kebutuhan minyak tanah untuk nelayan dan omprongan tembakau memiliki volume yang besarnya mendekati atau sama dengan pengurangan minyak tanah oleh substitusi elpiji. "Karena itu konsumsi minyak tanah 2007 sama dengan tahun ini," jelas dia.

Volume BBM bersubsidi dibagi dalam empat wilayah niaga, WDN I (Sumatera), WDN II (Jawa dan Bali), WDN III (Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya), dan WDN IV (NTB dan NTT). Pada 2007, konsumsi WDN I 9,648 juta kiloliter, WDN II 25,9 juta kiloliter, WDN III 7,398 juta kiloliter, dan WDN IV 684 ribu kiloliter.

Harus Tambah Subsidi

Pengamat migas Kurtubi berpendapat, pemerintah harus menambah besaran subsidi BBM dalam APBN 2006 bila berkomitmen tidak akan menaikkan harga BBM. Dia memastikan, nilai subsidi pada APBN 2006 akan membengkak dan tidak akan mencukupi jika pemerintah masih dengan asumsi harga

minyak US\$ 57 per barel. "Kenyataannya, harga minyak masih pada kisaran US\$ 70 per barel," kilah dia.

Pada 2005, Panitia Anggaran DPR RI telah memutuskan subsidi BBM pada 2006 sebesar Rp 54,3 triliun. Penetapan subsidi itu berdasarkan perhitungan volume subsidi konsumsi BBM yang diperkirakan mencapai 41,57 juta kl, terdiri atas premium 17,08 juta kl, minyak tanah 10 juta kl, dan solar 14,498 juta kl.

Bila pemerintah tidak menambah nilai subsidi BBM, Kurtubi memperkirakan pada akhir tahun ini bisa terjadi terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. "Kalau sudah begitu, pemerintah dan masyarakat harus siap akan terjadi kelangkaan BBM di mana-mana," imbuh dia.

Dia mengingatkan pemerintah agar mencermati kelangkaan BBM belakangan ini, seperti di Bengkulu, dan Jawa Timur. Kemungkinan hal itu terjadi karena Pertamina menghemat belanja dan anggaran BBM bersubsidi agar mencukupi hingga akhir tahun.

Kurtubi menyambut baik program pemerintah yang mendorong penggunaan diversifikasi bahan bakar gas (BBG) dan program biodiesel. Program itu akan mengalihkan sebagian konsumsi BBM bersubsidi masyarakat ke kedua bahan bakar tersebut. "Namun, dampaknya masih kecil terhadap pengurangan konsumsi BBM solar dan premium bersubsidi tidak akan mencapai 10% pada tahun ini," kata dia.

Kurtubi menyarankan pemerintah



agar mendorong besar-besaran program diversifikasi pengembangan biodiesel, dari bahan kelapa sawit ke minyak jarak yang harganya jauh lebih murah. Pemerintah harus mempermudah izin area penanaman minyak jarak dan memberikan bantuan bunga bagi UKM dan koperasi. "Sehingga mereka bisa membeli mesin biodiesel yang terjangkau dengan kapasitas 150 liter per hari hingga 1.000 liter per hari," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi menegaskan, Komisi VII DPR akan tetap memantau tren harga minyak dunia agar kuota BBM 2006 sebesar 41,6 juta kl tetap bisa dipenuhi pemerintah dan tidak akan terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. "Tapi, kita juga ja-

ngan terlalu mempertentangkan antara kuota BBM dengan nilai subsidi dalam APBN 2006 yang kemungkinan tidak akan mencukupi," katanya.

Menurut dia, nilai subsidi dalam APBN 2006 belum tentu tidak akan cukup untuk berbelanja sesuai kuota BBM yang telah ditetapkan. Sebab, harga minyak dari awal hingga akhir 2006 akan berfluktuasi, tidak selalu di atas US\$ 70 per barel.

"Kami akan terus mencermati apakah nilai subsidi itu tidak akan cukup untuk memenuhi kuota BBM yang telah ditetapkan. Jika tidak, APBN 2006 perlu diubah dan itu akan diusulkan oleh komisi kami ke Panitia Anggaran," katanya. (ari/lim)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006



BIO-SOLAR – Menteri Negara BUMN Sugiharto disaksikan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Meneg Riset & Teknologi Kusmayanto Kadiman melepas truk tangki bio-solar di Jakarta, Sabtu (20/5). Peluncuran bio-solar Pertamina yang terdiri 5% CPO (dalam bentuk *Fatty Acid Methyl Ester*) dan 95% solar murni bersubsidi itu guna membantu program menurunkan volume pemakaian BBM bersubsidi. Diharapkan, penggunaan bio-solar itu dapat menghemat impor solar 750 ribu kiloliter per tahun.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS | <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI | <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| HALAMAN: A.8. | | | | | | | | | | | TAHUN 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tanaman Jarak untuk Lahan Kritis Wonogiri

WONOGIRI — Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menyiapkan sekitar 54 ribu hektare lahan untuk budi daya tanaman jarak yang bakal digunakan sebagai bahan bakar minyak. Lahan itu merupakan lahan kritis yang terletak di Kecamatan Jatiroto, Kismantoro, Eromoko, Parangpupito, dan Pracimantoro.

Diperkirakan dari luas area itu akan diperoleh ra-

tusan ribu liter bahan bakar pengganti solar atau biodiesel, yang tengah dikampanyekan pemerintah. "Uji coba penanamannya akan dimulai pada awal musim hujan tahun ini," kata Kepala Subdinas Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri M. Taufiq kemarin. Awal musim hujan diperkirakan akan dimulai sekitar Agustus.

Menurut Taufiq, Dinas

Pertanian Wonogiri saat ini juga tengah menyusun studi uji kelayakan penanaman jarak dengan investor swasta. Pihaknya telah mendapatkan tawaran dari sejumlah investor yang menyatakan ketertarikan dengan budi daya tanaman jarak sebagai bahan baku biodiesel.

"Tapi kami harus berhati-hati karena masyarakat Wonogiri agak trauma terhadap proyek semacam ini.

Sebelumnya ada budi daya tanaman jarak *kepyar* yang dapat diolah untuk bahan pembuatan sabun, oli kendaraan, dan kosmetik, tapi kurang berhasil," kata dia.

Dari studi yang dilakukan, setiap lahan 1.000 hektare tanaman jarak dapat menghasilkan sekitar 2.000 liter bahan bakar pengganti solar. Menurut Taufiq, produksi pembuatan minyak jarak juga terhitung relatif

sederhana karena dapat dilakukan secara manual dengan mesin sederhana, yang harganya Rp 3 juta per unit. Ia berharap uji coba penggunaan lahan kritis dengan penanaman jarak mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. "Kami meminta persetujuan untuk dialokasikan dana bagi uji coba ini pada APBD Perubahan," ujarnya. ● MACH NOSTO

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2006



COCODIESEL di Tanah Terpencil

Pengolahan kelapa menjadi cocodiesel dinilai akan lebih menguntungkan.

Di daerah terpencil, harga solar bisa melambung mencapai Rp 10 ribu - Rp 15 ribu per liter. Di daerah terpencil pula, harga kelapa hanya berkisar Rp 1.500-Rp 1.700 per kilogram. Di kota, harga kelapa bisa mencapai Rp 2.400-Rp 2.600/kg.

Bagaimana membantu masyarakat terpencil agar bisa mendapatkan bahan bakar murah dan harga kelapa yang sepadan? Cocodiesel jawabannya. Kelapa, menurut Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, akan dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak nabati.

Anton mengatakan potensi kelapa di Indonesia sangat besar, meski produktivitasnya masih rendah. Kini, Indonesia memiliki total area perkebunan kelapa seluas 3,8 juta hektare. Kata Anton, pemerintah akan mengupayakan peningkatan produktivitas kelapa dari yang sekarang hanya 1,1 ton kelapa per hektare per tahun menjadi produktivitas normal tiga ton per hektare per tahun.

"Sehingga pengolahan kelapa sebagai biodiesel atau kerap disebut cocodiesel itu strategis untuk meningkatkan industri hilir kelapa," kata dia, Selasa (16/5), usai membuka Konferensi Nasional Kelapa VI di Gorontalo.

Perkebunan kelapa tersebut menyerap tenaga kerja bagi 20 juta jiwa keluarga petani dan buruh tani. Sedangkan dari kebun seluas itu, 98 persennya

merupakan perkebunan rakyat.

Dari hasil kebun tersebut, Anton menambahkan konsumsi kelapa segarnya sebesar 45 persen. "Sisanya baru dapat diubah jadi biodiesel kelapa," ujar dia. Jumlahnya maksimal 800 ribu ton per tahun.

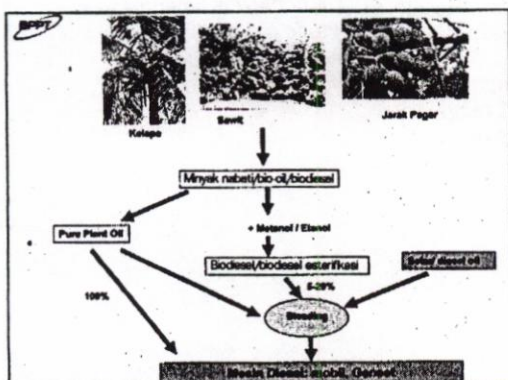
Tantangan lain, kini sekitar 30 persen tanaman kelapa di Indonesia sudah tua dan rusak. Untuk memperbaikinya diperlukan kerja keras dan peremajaan tanaman kelapa. Departemen Pertanian dalam tujuh tahun ke depan akan melakukan intensifikasi 1,4 juta hektare kebun kelapa. Kemudian memperluas sekitar 70 ribu hektare lagi. Pemerintah pun akan mendiversifikasi tanaman di lahan seluas 700 ribu hektare dan merehabilitasi atau meremajakan 700 ribu hektare tanaman kelapa.

Kendati masih kalah jauh dengan produksi minyak jarak atau kelapa sawit bagi biodiesel, Anton mengatakan pemanfaatan cocodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar di daerah terpencil. "Di situ penggunaan biodiesel kelapa menguntungkan," kata Anton.

Sebagai contoh, di Kepulauan Sangir Talaud harga solar bagi nelayan acapkali mencapai Rp 10 ribu per liter. Harga kelapa dari Manado atau Bitung sebesar Rp 1.200-1.400 per kilogram. Sedangkan setelah diolah menjadi biodiesel harganya menjadi Rp 6.000 per liter.

Perhitungan bahan baku dan prosesnya, yakni dua kilogram kelapa dapat menghasilkan satu liter biodiesel kelapa. Biodiesel ini lantas dapat dimanfaatkan untuk penggunaan perahu motor laut, genset, mesin alat-alat pengolahan skala kecil, dan lainnya.

Untuk mencapai pemakaian biodiesel bagi daerah terpencil kemudian dibutuhkan teknologi yang sederhana dan tidak besar. Departemen Perta-



● Pemanfaatan minyak nabati untuk mesin diesel

niar, kata Anton, telah memiliki model-model mesin pengolahan skala kecil dengan kapasitas 50-100 liter.

Pada tahun 2003-2006, Balai Penelitian Kelapa Departemen Pertanian bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung merakit mesin pengolah biodiesel kelapa. Mesin tersebut berkapasitas sekitar 100 liter per hari, dengan desain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil atau kepulauan.

Mesin diesel tertentu dimodifikasi hingga dapat menggunakan 100 persen biodiesel kelapa. Sedangkan Badan Penelitian Kelapa juga telah mencoba traktor dengan campuran 30 persen biodiesel kelapa.

juta per unit usaha," katanya. Pembiayaannya datang dari pemanfaatan potensi daerah yang disokong perbankan setempat.

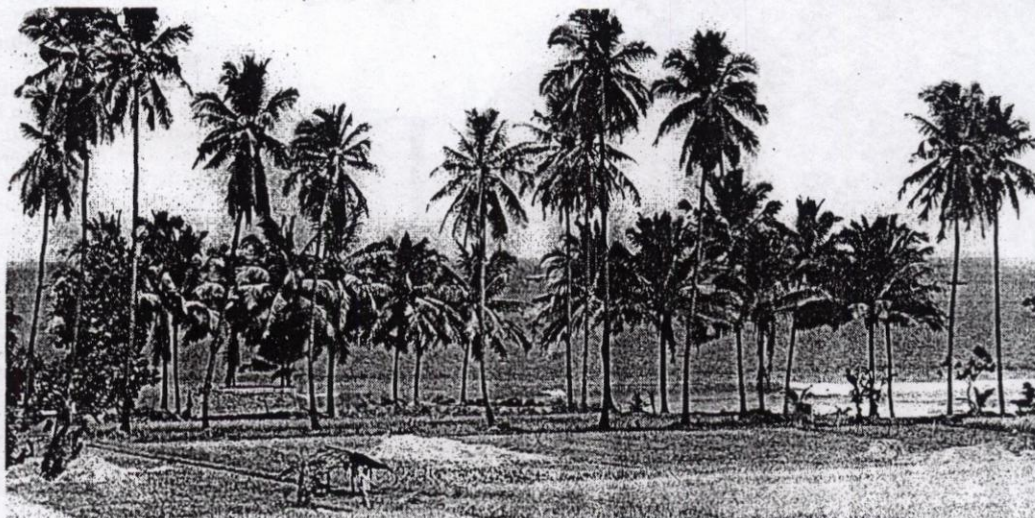
Pembangunan industri terpadu kelapa dapat dilakukan dengan mencontoh Gorontalo. "Di sini pemanfaatan kelapa tidak hanya monoproduk," kata Anton.

Saat ini industri berbahan baku kelapa yang berkembang adalah industri primer dengan dominasi minyak kelapa kasar (*crude coconut oil*). Sekitar 78 persen dari nilai ekspor kelapa pada tahun 2005 berasal dari minyak kelapa kasar. Nilai total ekspor kelapa pada tahun lalu adalah 529.830 juta dolar AS. Sedangkan volume ekspor

dan minyak nabati dunia. Jika di pasar domestik harga solar Rp 5.000 - Rp 6.000 per liter, praktis biodiesel kelapa tidak akan mampu bersaing. Tetapi jika pasar yang dibidik adalah pasar ekspor dengan harga Rp 10 ribu per liter dan harga minyak kelapa kasar di Rotterdam maksimum 700 dolar AS per ton, maka biodiesel kelapa akan menguntungkan.

Saat ini maksimum produksi biodiesel yang dapat dihasilkan pada tingkat produksi kelapa yang ada hanya 800 ribu ton per tahun. Namun peningkatan harga kelapa sebanyak dua kali karena dorongan harga energi akan meningkatkan pula produksi. Yakni minimal dua kali dalam lima tahun. ■ ind

RUSDY NURDIANSYAH/REPUBLIKA



Minyak kelapa kasar

Setidaknya ada delapan jenis industri hilir yang akan dikembangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo. "Di antaranya biodiesel, air kelapa, *nata-de coco*, sabuk kelapa, dan *virgin coconut oil*," jelas Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad.

Fadel mengatakan daerahnya akan memulai pembangunan beragam industri hilir berbahan baku kelapa. "Dengan nilai Rp 100 juta sampai Rp 150

juta per unit usaha," katanya. Harga rata-rata ekspor minyak kelapa kasar Indonesia ke mancanegara adalah Rp 5.000 per liter. Padahal harga kelapa di tingkat petani sangat ditentukan oleh harga jual minyak kelapa kasar. Pengembangan penggunaan biodiesel dari kelapa akan meningkatkan nilai tambahnya.

Potensi pengembangan biodiesel kelapa sangat tergantung pada harga minyak bumi

KELAPA:

2 kg kelapa mengandung 1 liter biodiesel.

BUAH JARAK:

Bijinya mengandung 30-35 persen minyak untuk biodiesel

KELAPA SAWIT:

1 liter minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) menghasilkan 1,05 liter biodiesel.

Sumber: Deptan

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

Menyadari Potensi dan Kekuatan D-8

Apa jadinya jika delapan negara berkembang—yakni Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Banglades, Nigeria, Mesir, dan Pakistan—bersatu menggabungkan seluruh potensi dan kekuatan yang ada? Tidak berlebihan jika kelompok delapan negara berkembang yang lebih dikenal dengan The Developing Eight (D-8) Countries itu setidaknya bisa mengimbangi kekuatan ekonomi negara-negara maju.

Oleh LUKI AULIA

Dari segi potensi sumber energi yang tidak dapat diperbarui, D-8 bisa dikatakan cukup *pede* (percaya diri) jika sekiranya disandingkan dengan negara-negara maju. Pasalnya, empat anggota D-8 yakni Iran, Nigeria, Malaysia, dan Indonesia memiliki sumber minyak dan gas bumi yang besar. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan jika produksi minyak keempat negara itu digabungkan, maka jumlahnya mencapai sekitar 10 juta barel per hari atau sekitar 12 persen dari jumlah total produksi minyak dunia.

Jika D-8 bisa bekerja sama mengembangkan dan memanfaatkan sumber potensi energi itu dengan semaksimal mungkin, maka setidaknya kebutuhan dalam negeri setiap anggota D-8 bisa terpenuhi. Kerja sama, persatuan, dan kesatuan di antara negara anggota D-8 dinilai penting dalam era globalisasi ini agar seluruh potensi yang ada pada masing-masing negara juga bisa ikut dinikmati rakyat masing-masing negara anggota D-8 dan tidak hanya dinikmati oleh

negara-negara maju.

Meski kerap kali disebutkan oleh para pemimpin delapan negara anggota bahwa D-8 harus bisa mengimbangi atau bahkan menandingi negara maju, itu tidak berarti D-8 sedang mengobarkan semangat konfrontasi antara negara berkembang dan negara maju. Yang diinginkan D-8 hanyalah memperoleh keuntungan dari sumber potensi yang dimiliki dan mengurangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam perdagangan dunia seperti yang terjadi saat ini. Berbagai bentuk kerja sama disepakati agar negara-negara D-8 tidak dirugikan, tidak disiasati, dan tidak ~~sempit berada pada posisi inferior~~.

"Penting bagi D-8 untuk meningkatkan level permainan sehingga menjadi sejajar dengan negara-negara maju. Kita ingin menjadi pemenang," kata Yudhoyono dalam jumpa pers usai Konferensi Tingkat Tinggi ke-5 D-8 yang berlangsung 9-13 Mei 2006 di Bali.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, D-8 diwanti-wanti

harus mulai serius membangun potensi diri untuk menjadi besar bersama dengan cara mempererat kerja sama. Seperti disebutkan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar yang menyatakan D-8 harus bersatu dan memiliki kesamaan pandangan untuk tidak membiarkan begitu saja negara-negara di luar D-8 mengambil keuntungan dari potensi yang dimiliki D-8.

"Mengapa kita berdiam diri dengan negara-negara lain yang mengambil keuntungan. Padahal kita yang memiliki potensi itu. Jika ada kesungguhan dan kita melihat kekuatan satu sama lain, kita bisa sukses," ujarnya. Dalam KTT ke-5 itu terjadi serangkaian pertemuan bilateral antarnegara anggota yang sebagian besar menyepakati kerja sama yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi. Yang cukup menonjol dari pertemuan kali ini adalah banyaknya kerja sama dalam bidang energi seperti minyak dan gas bumi.

Berbeda dengan empat pertemuan D-8 sebelumnya, dalam

pertemuan kali ini persoalan pengembangan sumber energi alternatif—seperti tenaga nuklir untuk tujuan damai—menjadi topik cukup hangat meski tidak mendominasi pertemuan. Bukan karena ketertarikan nuklir Iran menjadi sorotan dunia, tetapi semata-mata karena melonjaknya harga minyak dunia dan menipisnya persediaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui.

Padahal, kebutuhan akan energi justru semakin meningkat. Untuk mengurangi ketergantungan akan minyak, D-8 juga membahas tentang pengembangan sumber energi alternatif selain nuklir seperti angin, air, *bio fuel*, biomassa, dan solar (energi matahari).

Selain berbagai kesepakatan dalam pertemuan bilateral, D-8 kali ini juga menandatangani dua dokumen penting, yakni kerja sama perdagangan yang lebih berpihak (*Preferential Trade Agreement/PTA*) dan kerja sama bidang kepabeanan (*Multilateral Agreement among the D-8 Member States on Mutual Administrative Assistance in Custom*

Matters). Dua dokumen ini diharapkan akan menjadi landasan penting untuk mempererat hubungan perdagangan antar-anggota D-8.

Menteri Perdagangan RI Mari Pangestu menyebutkan, perkembangan perdagangan antar-negara anggota D-8 cukup mengembirakan. Dalam jangka waktu enam tahun jumlah perdagangan antaranggota meningkat dari 14,5 miliar dollar AS pada tahun 1999 menjadi 33 miliar dollar AS pada tahun 2004. Peningkatannya diperkirakan mencapai 127 persen dalam jangka waktu lima tahun. Khusus bagi Indonesia tingkat perdagangannya dengan negara-negara anggota D-8 berkembang lebih dari 18 persen per tahun. Pada tahun 2005 total perdagangan dengan negara-negara anggota D-8 sebesar 9 miliar dollar AS. Jumlahnya meningkat dari 7,5 miliar dollar AS (20 persen) pada tahun 2004.

Secara konkret hasil kesepakatan yang diperoleh dari KTT kali ini, kata Mari, di dalam PTA disebutkan akan ada penurunan tarif impor masuk barang menjadi delapan persen bagi negara-negara anggota D-8 yang memiliki tarif sebesar 10 persen. Penurunan tarif bea masuk impor itu akan selesai dilakukan dalam jangka waktu empat tahun bagi negara berkembang, sementara bagi negara kurang berkembang akan membutuhkan waktu hingga delapan tahun. Kesepakatan ini diharapkan akan bisa meningkatkan perdagangan antarnegara anggota D-8. Selain penurunan tarif, disepakati pula adanya kemudahan dalam pengurusan visa para pengusaha yang hendak menanamkan investasi antarnegara anggota D-8.

“
Jika produksi minyak keempat negara digabungkan, jumlahnya mencapai 10 juta barel per hari atau 12 persen dari produksi minyak di dunia.

“Tetapi tidak bisa diperkirakan jumlah perdagangan nantinya akan seberapa besar. Tiga bulan mendatang baru akan dibahas barang-barang apa yang bisa masuk. Tetapi harus tetap diingat meski telah ada penurunan bea masuk impor, tidak otomatis meningkatkan perdagangan. Harus ada langkahantisipasi dan fasilitas perdagangan serta investasi yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan,” kata Mari.

Kekuatan negara Muslim

Kesadaran untuk bekerja sama membangun kekuatan ekonomi baru khususnya di kalangan negara berkembang Muslim muncul tahun 1996. Dari usulan mantan Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan terbentuklah D-8 pada tahun 1996. Ketika itu tujuan D-8 adalah untuk menciptakan organisasi yang dinamis dan kuat yang disetujui delapan negara berkembang yang Muslim untuk memperkuat kerja sama multilateral di antara mereka.

Ada keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum masing-masing negara dan memperluas hubungan perdagangan, ekonomi, dan politik di antara mereka. Sebelum sepakat ber-satu, ada pertimbangan yang cukup rumit mengingat kedelapan negara itu memiliki potensi yang beragam dan berbeda satu sama lain. Kedelapan negara itu juga masing-masing sudah terlebih dahulu bergabung dengan blok-blok perdagangan lainnya.

Kelompok D-8 ini termasuk unik dan sangat berbeda dengan kelompok ekonomi atau regional lainnya seperti Uni Eropa, ASEAN, ataupun NAFTA. Negara anggota D-8 berasal dari tiga benua yang berbeda, yakni Afrika, Eropa, dan Asia. Kesamaan yang ada di antara negara anggota D-8 adalah sama-sama negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata lima persen dan Muslim. Sama-sama memiliki orientasi pada pasar dan sama-sama menganggap sektor

swasta sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, sejak awal pembentukannya telah disepakati bahwa untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada, maka perekat yang utama adalah kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengingatkan ada “kekuatan penguasa dunia baru” yang berusaha mengeksploitasi globalisasi demi memperluas hegemoninya sendiri. Kepentingan

negara-negara anggota D-8 akan terjaga aman hanya jika ada rasa persatuan untuk berani bersaing dan bersuara lebih keras di komunitas internasional. Agar tidak terpinggirkan, D-8 diminta untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam berbagai persoalan dunia. “Upaya ini dipastikan akan bisa ikut memengaruhi proses globalisasi dan menaikkan *bargaining power* negara berkembang,” ujarnya.

Meski telah disepakati keinginan untuk berkembang dan

mempererat kerja sama, Yudhoyono mengaku bahwa memang belum banyak yang bisa dilakukan D-8 mengingat usianya baru mencapai sembilan tahun. Ke depan D-8 diharapkan akan bisa berbuat lebih banyak dengan agenda yang lebih konkret. Yang penting bagi D-8 adalah harus memiliki kemauan politik dan komitmen untuk membentuk organisasi yang efektif dengan mekanisme yang tepat untuk melaksanakan Deklarasi Bali.

Sebenarnya D-8 masih bisa

mencapai ungkat perdagangan antaranggota D-8 yang lebih baik, namun terdapat beberapa masalah yang menghadang. Masalah-masalah yang menghadang itu mayoritas bukanlah masalah ekonomi, tetapi masalah yang berkaitan dengan politik dan keamanan.

Persoalan itu dinilai paling berperan dalam memengaruhi roda perekonomian negara-negara anggota D-8. Padahal, setiap bentuk kerja sama antarnegara, khususnya bagi organi-

sasi regional ekonomi dan pembangunan, membutuhkan stabilitas ekonomi agar perdagangan internasional meningkat. Kini menjadi tugas Indonesia sebagai ketua D-8 selama dua tahun mendatang untuk mewujudkan hasil kesepakatan KTT ke-5 dan empat KTT sebelumnya. Dua tahun mendatang kita akan bisa melihat apakah D-8 mampu mewujudkan cita-citanya menjadi kekuatan ekonomi baru di blok negara berkembang yang Muslim.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MET JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: TS

TAHUN 2006

Karimun akhirnya miliki SPBU

TANJUNG BALAI KARIMUN:Perusda Karimun membangun SPBU pertama di Karimun, Kepulauan Riau dengan nilai investasi Rp8 miliar.

AR Purwanto Djamal, Dirut Perusda Karimun, mengatakan selama ini masyarakat di Tanjung Balai Karimun mendapatkan pasokan bahan bakar dari perusahaan swasta dalam jumlah terbatas. "Sebenarnya kami sudah lama ingin membangun SPBU, tapi terkendala proses perizinan yang tidak mudah," ujar Purwanto kepada pers, pekan lalu.

Untuk tahap awal, SPBU yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta yang diresmikan akhir pekan lalu itu akan menyediakan solar 90 kilo liter (kl), dan premium 180 kl. "Pasokan kemudian disesuaikan dengan permintaan pasar."

Dia mengatakan untuk saat ini Perusda Karimun belum berpikir untuk menambah jumlah SPBU dalam waktu dekat ini. "Karena diperkirakan modal baru kembali setelah 3,5 tahun beroperasi." (BISNIS/LTC)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: **75**

TAHUN 2006

Pertamina minta PLN lunasi utang Rp19 triliun

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: PT Pertamina meminta kepada pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tunggakan utang PT PLN kepada Pertamina sebesar Rp19 triliun dari pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional pembangkit listrik.

Pertamina mengharapkan agar tunggakan utang tersebut dapat segera dilunasi guna menjaga kelancaran *cash flow* BUMN tersebut, sehingga dapat tetap eksis menjaga stabilitas penyaluran BBM.

Dirut PT Pertamina Ari H Soemarno mengatakan tertunggaknya utang PLN tersebut akan segera dibahas di tingkat pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Menurut dia, untuk menjaga kelangsungan BBM, Pertamina mem-

butuhkan *cash flow* yang baik, jadi diperlukan pembayaran utang yang tepat waktu.

"Nanti *ngomong* dengan pemerintah khususnya Meneg BUMN, dan konsultasi dengan Menteri Keuangan," ujarnya di Jakarta kemarin.

Ari mengharapkan pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dia yakin masalah utang PLN akan segera diselesaikan pemerintah. "Nanti diselesaikan. Pasti ada jalan keluar, karena pemegang sahamnya pemerintah."

Meski menunggak utang, lanjut Ari, Pertamina tidak akan menyetop penyaluran BBM ke PLN karena keberadaannya yang amat penting bagi masyarakat. Namun, dia menegaskan, Pertamina sebagai BUMN yang menyediakan stok BBM juga sangat penting

untuk memastikan pasok BBM kepada masyarakat.

Sebelumnya, PT PLN belum bisa memastikan waktu pembayaran tunggakan utang pembelian BBM ke Pertamina sebesar Rp19 triliun karena subsidi pemerintah senilai Rp15 triliun sejak Juni 2005 belum cair. Akibatnya, PLN belum bisa melunasi utang dari pembelian BBM untuk operasional pembangkit kepada Pertamina.

Sejak Juni 2005 subsidi listrik yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp15 triliun (selama 2005) ditambah Rp2,5 triliun (sisa 2004) untuk PLN belum juga dicairkan. Subsidi sebesar Rp3,5 triliun untuk 2006 juga belum turun. Keterlambatan tersebut berpengaruh langsung terhadap semua operasional PLN. (K18)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/> |
|--|--|

KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI GEOLOGI
 MIGAS UMUM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

HALAMAN: 22

TAHUN 2006

SUBSIDI ELPIJI

Masyarakat Pedalaman Lebih
Membutuhkan Minyak Tanah

JAYAPURA, KOMPAS – Rencana pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah ke gas elpiji dinilai tidak berpihak kepada sebagian besar masyarakat di pedalaman Papua. Penggunaan gas elpiji membutuhkan beberapa komponen dengan biaya yang relatif lebih tinggi. Apalagi jika mengingat kompor minyak tanah saja belum begitu memasyarakat di pedalaman.

Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Paulus Sumino di Jayapura, Sabtu (20/5), mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut mungkin cocok diterapkan di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, daerah lain, khususnya daerah pedalaman di luar Jawa dan Sumatera seperti Papua masih membutuhkan minyak tanah sebagai sarana yang dinilai paling murah dan mudah digunakan dalam rumah tangga.

"Ongkos angkut tabung gas elpiji dengan pesawat ke pedalaman justru jauh lebih mahal dibandingkan dengan minyak tanah. Mungkin bisa mencapai Rp 25.000 per kg, mengingat satu tabung gas beratnya sampai 15 kg. Saat ini ongkos angkut minyak tanah ke pedalaman Rp 15.000 per kiloliter," kata Sumino.

Harga eceran tertinggi minyak tanah di kios-kios di Jayapura

mencapai Rp 2.700 per liter, sedangkan di kawasan pedalaman Rp 5.000-Rp 10.000 per liter, tergantung jarak tempuh pesawat terbang.

Sekarang harga satu unit kompor gas Rp 700.000-Rp 1 juta. Adapun harga tabung gas bersama isinya Rp 500.000 per tabung, sedangkan harga selang gas elpiji Rp 50.000-Rp 100.000 per tiga meter.

Selain mahal, masyarakat pedalaman banyak yang belum mengenal kompor gas secara baik. Bahkan, banyak yang belum memiliki kompor minyak tanah. Umumnya yang memiliki kompor minyak tanah adalah masyarakat pedalaman di tingkat kabupaten atau kecamatan. Masyarakat yang tinggal di kecamatan terpencil sebagian besar masih menggunakan kayu bakar untuk memasak dan kebutuhan sejenis lainnya.

Karena itu, Sumino mengimbau, berkaitan dengan kebijakan ini pemerintah jangan memaksakan kehendaknya terhadap daerah pedalaman. "Bagi daerah pedalaman seperti di Papua lebih baik pemerintah menggalakkan budidaya tanaman pohon jarak dan penggunaan batu bara karena tidak punya risiko tinggi bagi gangguan keamanan," kata Sumino menambahkan. (KOR)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **M** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 415

TAHUN 2006

Medco : Tawaran Peminat Apexindo Tak Menarik

JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk mengaku sudah menerima tawaran Aban Loyd Chiles Offshore Ltd., yang berencana mengakuisisi 51,97 persen saham unit usahanya, PT Apexindo Pratama Duta Tbk.

Namun, menurut Sekretaris Perusahaan Medco Energi Andy Karamoy, tawaran itu hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan apa-apa. Pasalnya, penawaran yang diberikan perusahaan asal India itu dinilai kurang menarik.

"(Penawarannya) kurang menarik, jadi *nggak diapa-apain*," kata Andy kepada *Tempo* sambil menolak menjelaskan nilai penawaran yang disampaikan Aban Loyd.

Seperti dilansir *Reuters* akhir pekan lalu, eksekutif perusahaan pengeboran lepas pantai India itu menyampaikan kesiapannya mengambil mayoritas saham unif usaha perusahaan milik pengusaha Arifin Panigoro yang bergerak di bidang pengeboran minyak lepas pantai tersebut.

Sebenarnya kabar Medco akan melepas Apexindo telah berembus sejak April lalu. Saat itu Presiden Di-

rektur Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan perseroan akan menjual sahamnya di anak perusahaan yang bergerak di kontraktor pengeboran itu. Walau sewa peralatan pengeboran sedang bagus, kata Hilmi, jenis usaha Apexindo bukanlah *core business* perseroan. "Jika harganya bagus, bisa saja melepas saham di Apexindo. Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan formal," kata Hilmi.

Maret lalu, Apexindo membangun sebuah *rig jack up* baru senilai US\$ 137 juta di galangan kapal PTL Ship Yard Sembawang, Singapura. Pembiayaan pembuatan *rig* baru itu 20 persennya diambil dari kas internal. "Sudah dibayarkan awal 2005 sebagai uang muka," kata Sekretaris Perusahaan Apexindo Ade Satari. Sisanya akan dibayarkan saat PTL mengantarkan *rig* itu.

Apexindo berencana menggaet investor-investor itu untuk membentuk konsorsium pendanaan, yang totalnya mencapai US\$ 120 juta. Kontrak untuk *rig* yang akan bernama Soehanah itu bahkan sudah ditawarkan di beberapa tempat. ● SULIYANTI PAKPAHAN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A18

TAHUN 2006

Pertamina Akan Konsultasikan Tunggakan PLN

JAKARTA — PT Pertamina akan berkonsultasi dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan mengenai subsidi bahan bakar minyak PT PLN (Persero) yang belum dibayar. "Kalau mau bagus (pasokan BBM), semua pembayaran harus tepat waktu," kata Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno pekan lalu.

Menurut dia, Pertamina tidak akan memberikan batas waktu bagi PLN untuk melunasi pembayaran tunggakan BBM. Pertamina juga tidak akan menghentikan pasokan BBM meski pemasok listrik pelat merah ini belum membayar utang. "Kami akan cari jalan keluar yang terbaik," katanya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PLN Parno Isworo menyebutkan PLN belum menerima subsidi yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 17 triliun. Subsidi ini digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional, terutama pembelian bahan bakar guna mengoperasikan pembangkit listrik.

Menurut dia, PLN sudah melayangkan surat sebanyak dua kali kepada Departemen Keuangan mengenai realisasi pencairan subsidi. Namun, hingga kini kedua surat itu belum juga ditanggapi. Padahal, jika tidak segera ditindaklanjuti, bisa mengganggu kegiatan operasional PLN. • AQIDA SWANURTI

MONITOR BERITA

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/> |
|--|--|

KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI GEOLOGI UMUM
 MIGAS

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: **A 18**

TAHUN 2006

Harga minyak mentah di pasar internasional belakangan ini terus berada pada kisaran US\$ 70 per barel, angka yang jauh di atas patokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006, yakni US\$ 57 per barel. Tahun ini harga minyak diperkirakan tetap tinggi. Tingginya harga minyak itu di khawatirkan akan menggelembungkan subsidi bahan bakar minyak dan ujung-ujungnya akan menaikan defisit anggaran. Berikut ini tulisan bersama bung Tempo tentang dampak harga minyak tinggi bagi Indonesia.

BAGIAN PERTAMA DARI EMPAT TULISAN

Minyak Mahal, Musibah atau Berkah

Surplus karena konsumsi bahan bakar minyak turun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cemas. Tak henti-hentinya ia memantau perkembangan harga minyak mentah dunia yang dari hari ke hari terus merangkak. Pekan lalu harga minyak dunia sudah di atas US\$ 73 per barel. Yudhoyono khawatir tingginya harga minyak akan mengganggu keuangan negara.

Akhir Maret lalu, dalam peringatan Hari Nyepi Nasional di Makassar, Presiden mengatakan tingginya harga minyak itu akan memukul perekonomian semua negara, termasuk Indonesia. Menurut dia, dunia tak bisa menghindar dari tingginya harga yang dipicu oleh ketegangan Iran dan Amerika Serikat soal nuklir dan kemungkinan menurunnya produksi minyak Nigeria.

Namun, kecemasan Presiden sedikit mencair belakangan ini. Lonjakan subsidi bahan bakar minyak akibat tingginya harga minyak mentah dunia, seperti yang terjadi pada tahun lalu, ada kemungkinan

tidak akan terulang. Sebaliknya, negara justru menuai sedikit berkah akibat tingginya harga. Tambahan pendapatan dari ekspor minyak mentah (*windfall profit*) dipastikan bisa menutup pembengkakan subsidi BBM.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghitung, kenaikan harga minyak sampai US\$ 70 per barel malah bisa menekan defisit APBN 2006. Berdasarkan simulasi, bila harga minyak US\$ 60 per barel, defisit diperkirakan 1,3 persen produk domestik bruto (sekitar Rp 40 triliun). Namun, bila harga minyak naik hingga US\$ 70 per barel, defisit justru turun menjadi 1 persen PDB (Rp 32,3 triliun).

Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan harga minyak yang tinggi memang menyebabkan subsidi BBM bertambah. Tapi kebutuhan dana itu bisa

ditutup oleh pendapatan dari ekspor minyak. "Pasti ada surplus, walaupun nilainya tidak signifikan. Berapa angkanya, saat ini sedang dihitung," ujarnya.

Namun, menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, surplus tidaknya anggaran tahun ini masih bergantung pada besarnya impor minyak mentah dan BBM. Tahun lalu impor minyak dan BBM Indonesia masih lebih tinggi daripada nilai ekspor, sehingga subsidi BBM membengkak. Awal tahun lalu Indonesia mulai menjadi *net importer* minyak.

Tahun ini impor minyak dan BBM memang menurun karena konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri turun sekitar 20 persen setelah pemerintah dua kali menaikkan harga BBM pada tahun lalu. Pada 2006, pemerintah menargetkan konsumsi BBM bersubsidi hanya 41,57 juta kiloliter, turun jauh dari realisasi tahun lalu sebesar

61,5 juta kiloliter.

Jika penurunan konsumsi BBM itu tetap bertahan sampai akhir tahun, Indonesia kemungkinan besar memang akan bisa meraih surplus dalam neraca minyak dan BBM. Bisa jadi Indonesia kembali menjadi *net exporter* minyak. Dan ini berarti juga akan berdampak positif bagi APBN 2006 (lihat tabel). Hanya, besaran surplusnya memang sangat bergantung pada realisasi konsumsi BBM bersubsidi tadi.

Kendati belum jelas berapa surplusnya, kebijakan pemerintah dua kali menaikkan harga BBM pada tahun lalu memang memberikan hasil positif bagi kondisi keuangan negara pada tahun ini. Beban subsidi berkurang sekitar 43 persen dan dampak kenaikan harga minyak di pasar dunia tidak terlalu berat lagi seperti tahun lalu.

Namun, langkah itu saja belum cukup. Penghematan konsumsi BBM harus terus diupayakan. Langkah itu bisa dilakukan antara lain melalui pembatasan penggunaan bahan bakar minyak yang mahal dan dengan mengusahakan terus menerus energi alternatif untuk menggantikan (substitusi) BBM.

• RETNO SULISTYOWATI



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MET** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: /

TAHUN 2006

Kejaksanaan Jeblosin Koruptor Balongan

TABRANI DIVONIS 6 TAHUN

Jakarta, RM. Kejaksaan Agung akan segera melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi proyek Export Oriented (Exor) I Balongan Tabrani Ismail. Eksekusi akan segera dilakukan setelah kejaksanaan menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengganjar bekas Direktur Pengolahan Pertamina itu dengan hukuman enam tahun penjara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya akan segera melakukan eksekusi terhadap Tabrani setelah menerima salinan putusan kasasi MA itu. "Sampai sekarang saya masih menunggu laporan dari Direktur UHEK (Urusan Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi) soal salinan putusan itu," katanya.

Sementara itu, Direktur UHEK Jampidsus

Septinus Hematang belum bisa dikonfirmasi apakah sudah menerima salinan putusan kasasi Tabrani. Saat dihubungi tadi malam, telepon genggamnya tidak aktif.

Tabrani yang sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, ternyata di tingkat kasasi dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek Exor I Balongan yang merugikan negara 189,58 juta dolar AS. Ia pun diganjar

hukuman enam tahun penjara, membayar denda Rp 30 juta subsider, tiga bulan penjara, dan membayar uang pengganti 189,58 juta dolar AS.

Menyusul keluarnya putusan kasasi MA itu, kejaksanaan akan kembali melanjutkan perkara Erry Putra Odang, Dirut PT Mitra Trans Balongan (MTB), kontraktor pembangunan kilang minyak Balongan. Erry Putra Odang yang merupakan keponakan (alm) Ibu Tien Soeharto. ■ IMI

40

MONITOR BERITA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|
| <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA | <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> | | | | | | | | | | |
| KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS | <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI | <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM | | | | | | | | | |
| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | | | | | | | | | |
| HALAMAN : 3 | | | | | | | | | | | TAHUN 2006 |

Pemerintah Dianggap Takut Kepentingan Asing

Seorang anggota DPD mengumpulkan tanda tangan untuk menggugat kontrak Blok Cepu dan Freeport.



JAKARTA — Lewat sebuah sarasehan memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Joang 45, Jakarta, sejumlah tokoh kemarin mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka menganggap negara ini sudah tidak mandiri karena perusahaan asing sudah menguasai sumber daya.

"Lewat acara ini," kata mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais, "kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa negara lain sudah banyak yang sukses merevisi kontrak karya perusahaan asing yang lebih menguntungkan masyarakat."

Amien mengkritik kebijakan pemerintah di bidang pertambangan. Dia menjadikan kasus Freeport yang dikuasai oleh perusahaan asing, begitu juga ladang minyak Blok Cepu oleh ExxonMobil, sebagai contoh.

Pada kesempatan itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Marwan Batubara, menggalang tanda tangan. Dia akan menggunakannya sebagai modal kuasa untuk menggugat dan membatalkan kontrak Blok Cepu serta kontrak karya Freeport ke pengadilan.

Kwik Kian Gie, Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, ikut berbicara. Menurut dia, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla terlalu lembek ketika menetapkan ExxonMobil sebagai pengelola Blok Cepu. "Presiden sangat mudah ditekan kepentingan asing, terutama dari Amerika Serikat," ujarnya.

Sarasehan yang juga dihadiri antara lain wartawan senior Rosihan Anwar dan budayawan Emha Ainun Nadjib itu menyampaikan sembilan seruan untuk pemerintah (lihat boks).

Presiden Yudhoyono sebenarnya diundang melalui surat tanpa amplop dengan pengantar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir. Presiden absen dan memilih lari pagi 10 kilometer di Bandung bersama Abdullah Gymnastiar, pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhid.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi demonstrasi berlangsung di jalan tol reformasi. Sekitar 50 orang dari Komite Persatuan Gerakan Rakyat kebetulan bertemu dengan demonstran lain dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar dan Mahasiswa

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Mereka mengkritik pemerintah Yudhoyono-Kalla, yang me-

reka sebut seperti boneka asing yang tunduk pada kepentingan modal internasional. ● BAGJA HIDAYAT | IRMANATI

Sembilan Seruan kepada Pemerintah

1. Menggelorakan semangat nasionalisme
2. Menjadikan kemajemukan sebagai modal bangsa
3. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing dan golongan
4. Konsisten terhadap amanat UUD 1945
5. Menjamin tidak lagi menyengsarakan rakyat
6. Bebas dari jerat utang
7. Memaksimalkan kekayaan alam dan mengembalikan aset dari tangan asing, seperti pengambilalihan saham Indosat dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
8. Tidak terbang pilih membe-rantas korupsi
9. Memajukan bekas presiden Soeharto dengan tetap menjalankan proses hukum terhadap tindak pidana yang sudah dilakukannya.

MONITOR BERITA

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input checked="" type="checkbox"/> Barisan Baru |
| KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM | |
| JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 <u>22</u> 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |
| HALAMAN: 9 TAHUN 2006 | |

Bio Solar Pertamina Siap Dipasarkan ke Konsumen

Jakarta, (Barisan) - Pertamina siap memproduksi dan menjual biodiesel dari bahan dasar minyak kelapa sawit atau CPO (crude palm oil). Biodiesel adalah salah satu jenis bahan bakar hayatinon fosil (biofuel) yang sedang di galakan pemerintah pemakalannya melalui Perpres No.5 Tahun 2006 dan Inpres No. 1 Tahun 2006. Bahan bakar ini secara bertahap akan mengurangi peran solar di masyarakat. Demikian disampaikan Deputy Direktur Pemasyarakatan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, Selasa di Jakarta.

Menung Hanung, dengan kualifikasi biodiesel B-5 yang diluncurkan 20 Mei 2006 ini, biodiesel bermerek BioSolar tersebut mengandung lima persen CPO yang telah dibentuk menjadi fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 95 persen solar murni bersubsidi. Dengan formula seperti itu maka dalam tahun 2006 ada peng-

hematan impor solar sebanyak 720.000 kiloliter (KL). Ini adalah proyek untuk solusi bangsa di bidang energi, ujarnya.

Tak berlebihan, karena dengan langkah Pertamina ini berarti Indonesia pada 20 Mei 2006 telah memulai sesuatu yang bersejarah yaitu mengembangkan energi alternatif. Yang memiliki multiplier effect secara ekonomi dan ketahanan bangsa di sector energi. Memilih tanggal 20 Mei 2006 sebagai tanggal peluncuran produk perdana ini, pasti tak terlepas dari semangat histories kebangkitan bangsa pada 20 Mei 1908 oleh organisasi Budi Utomo.

Boleh jadi peluncuran produk BioSolar ini merupakan langkah Pertamina (bangsa Indonesia) menuju alam yang bebas krisis, atau kalau perlu menuju alam yang membawa kembali kejayaan bangsa. Nilai dan semangat dibalik dari peluncuran

yang tidak boleh di abaikan dan dipandang sebelah mata. Parameternya adalah langkah nyata yang semangat problem solving. Problem energi nasional tak hanya Indonesia yang di paksa berpikir untuk mengambil langkah strategis, berjangka panjang, berkesinambungan, di seputar masalah Kebijakan energi. China yang mengonsumsi minyak 6,5 juta bph pada tahun 2004 dan diperkirakan memakai 10,5 juta bph pada tahun 2020, sedang melakukan "revolusi" energi.

Selain itu Amerika Serikat, dan Negara Eropa, serta sejumlah negara seperti Jepang, Thailand, dan India. Kalau tidak direm, konsumsi minyak oleh bangsa Indonesia bisa melonjak tajam. Ada pakar yang mencatat prediksi kebutuhan BBM dalam negeri pada tahun 2010 sekitar 1,6 juta bph. Kebutuhan ini ekuivalen dengan minyak mentah 2 juta bph. Apa

yang dicatat sang pakar memang belum terjadi, tetapi kalau trend konsumsi BBM oleh negara ini tidak direm, kemungkinan krisis energi minyak tidak mustahil terjadi. Karena kebutuhan energi adalah bersifat kebutuhan primer dan selalu beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dengan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang terus di pacu dan terus membaik, maka tingkat konsumsi energi akan ikut terdongkrak. Energi memang tidak hanya minyak bumi. Namun kalau melihat pola konsumsi minyak bumi yang masih dominan, maka gerakan klimaks konsumsi BBM dalam negeri tidak gampang di stop. Dengan teori berpikir seperti ini kita bisa menerima angka prediksi kalau impor minyak mentah Indonesia akan melonjak di atas 400 ribu bph. Padahal saat ini masih tercatat, sekitar 0,400 juta bph, ujar Hanung. (J-07/Ulin)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 **28** 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2006

Segera Pilih, Gas atau Briket



Kita terlambat mengembangkan sumber energi alternatif. Kebijakan yang konsisten membantu mengurangi akibatnya.

BERGANTUNG pada energi tak terbarukan seperti minyak bumi, seperti yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia, menimbulkan kerugian besar. Masalah pelik kini menjangkiti anggaran negara. Bayangkan, hanya untuk minyak tanah saja pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp 42 triliun setiap tahun. Jumlah ini perlu disediakan karena konsumsi minyak tanah demikian besarnya, mencapai 12 miliar liter setahun. Belum lagi solar dan bensin serta bahan bakar yang lain. Keseluruhan anggaran negara yang dikucurkan untuk subsidi ini tahun lalu mencapai Rp 113 triliun.

Menghapus sama sekali subsidi itu dari anggaran, dengan cara menaikkan harga eceran bahan bakar minyak, ternyata sangat sulit. Bahkan sudah menjadi persoalan politik, karena mengundang protes dan demonstrasi. Subsidi mungkin bisa diturunkan perlahan-lahan, dengan segala risiko politiknya, tapi menggenjot pasokan energi alternatif perlu secepatnya dilakukan.

Memang terlambat, tapi lebih baik segera memilih energi alternatif yang akan dikembangkan ketimbang tidak melakukan apa pun. Dalam soal memilih alternatif pun pemerintah perlu konsisten. Kebijakan yang berubah-ubah, selain tidak menolong keadaan, juga boros waktu dan biaya.

Kampanye briket batu bara merupakan contoh inkonsistensi itu. Dengan alasan cadangan batu bara masih 150 tahun lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Oktober tahun lalu, menganjurkan pemakaian briket secara massal. Menteri Koordinator Perekonomian, waktu itu Aburizal Bakrie, bertekad menyiapkan 10 juta tungku batu bara sampai tahun 2009. Tahun ini, sebagai langkah awal, sejuta kompor akan dibuat. Anggaran negara Rp 50 miliar disiapkan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikerahkan. Bahkan PT Bukit Asam, badan usaha milik negara, sudah siap menambang batu bara sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya.

Bagaimana nasib proyek spektakuler itu sekarang? Dua pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, "Lupakan briket batu bara." Ia baru pulang dari Cina, akhir April lalu, dan mengetahui bahwa proyek hemat energi Cina yang mengandalkan batu bara sudah diakhiri 20 tahun lalu. Cina kini menganjurkan 1,5 miliar rakyatnya memakai gas. Briket dianggap tidak praktis, rakyat tak terbiasa memakainya, juga ada dampak buruk untuk kesehatan.

Pemerintah Indonesia pun beralih mendorong rakyatnya memakai gas. Wakil Presiden dan Menteri Perindustrian meminta Asosiasi Industri Tabung Gas, yang selama ini sepi order dan terpaksa merumahkan 60 persen karyawannya, menyediakan 121 juta tabung gas dalam tiga tahun. Rakyat miskin yang sekarang memakai minyak tanah akan diminta membeli tabung gas berkapasitas tiga kilogram. Dihitung-hitung, penghematan dari mengganti minyak tanah dengan elpiji ini mencapai Rp 17,4 triliun setahun.

Belum jelas bagaimana rakyat miskin bisa membeli tabung itu. Tapi, yang lebih penting, harus ada prioritas kebijakan yang akan dipilih. Kasus briket dan elpiji semestinya tidak terjadi lagi.

Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai kebijakan energi nasional. Itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005, yang diberlakukan sejak 25 Januari 2006 lalu, dengan target pencapaian sasaran jauh sampai tahun 2025.

Selain terlampau panjang waktunya, perlu dijelaskan secara detail langkah-langkah untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, dan meningkatkan sumber energi yang lain. Kalau perlu, ada semacam *timeline* pencapaian hasil kerja tahun demi tahun sejak peraturan itu dibuat.

Dengan begitu, kebijakan mengembangkan energi alternatif bisa konsisten dilakukan, dan tak gonta-ganti mengikuti hasil kunjungan pejabat ke luar negeri.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

HALAMAN: 84

TAHUN 2006

Tak Briket, Mendadak Elpiji

Diperlukan 121 juta tabung baru untuk mengganti minyak tanah dengan elpiji. Tetap berat bagi kelompok miskin.

JIKA diibaratkan durian runtuh, yang diterima para pengusaha tabung gas kali ini pastilah berpohon-pohon durian runtuh berbarengan. Setelah setahun belakangan bisnis mereka terkulai karena sepi order, sampai-sampai sekitar 60 persen karyawan terpaksa dirumahkan, order raksasa datang sekonyong-konyong.

Senin pekan lalu, delapan perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Industri Tabung Gas (Asitab) dikumpulkan di kantor Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Menteri Fahmi meminta kalangan industri ini mendukung kebijakan pemerintah mengalihkan konsumsi minyak tanah masyarakat ke gas alam cair atau elpiji (LPG). Caranya dengan menyediakan 121 juta tabung gas dalam tiga tahun ke depan.

Rapat di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, pekan sebelumnya, memang meminta Fahmi mengkoordinasi pengadaan tabung. Adapun urusan kompor akan ditangani Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua

produk ini akan disubsidi pemerintah dengan dana yang dialihkan dari penghematan subsidi minyak. "Akan dibuat murah sekali, sama dengan harga kompor minyak tanah," kata Fahmi.

Meski senang hati berbunga-bunga, "Kalau mendadak begini, kami tak mampu," kata Ketua Umum Asitab, Tjiptadi. Soalnya, selama ini mereka hanya memproduksi tabung ukuran 12 kilogram, dengan kapasitas maksimal 8 juta buah per tahun. Pemerintah meminta tabung tiga kilogram. "Harus ada investasi baru," katanya.

Tapi, Wakil Presiden tampaknya sudah bulat dalam soal ini, walaupun terkesan mendadak dan menabrak program mengganti minyak dengan briket batu bara, yang Oktober lalu dicanangkan Presiden Yudhoyono. "Konversi ke elpiji lebih mudah," kata Jusuf Kalla.

Tak cuma pengusaha tabung, produsen baja seperti Krakatau Steel pun akan turut ketiban rezeki proyek dadakan ini. Kalau mulus, pada akhirnya pemerintah jua—yang selama ini terus-terusan menombok karena minyak—yang akan

untung, karena konversi itu akan menghemat triliunan rupiah.

Dalam APBN tahun ini, harga minyak masih dipatok pada US\$ 57 per barel. Padahal, dalam bulan-bulan terakhir saja harga di pasar dunia terus bertengger di kisaran US\$ 70. Memang, kenaikan harga minyak tak selalu membuat tekor kantong pemerintah. Sebab, sebagai produsen, Indonesia pun turut menikmati keuntungan dari hasil ekspor produk ini yang sering disebut dengan istilah *windfall profit*.

Keuntungan bisa diperoleh kembali setelah pemerintah menaikkan harga eceran lebih dari seratus persen, Oktober tahun lalu. Subsidi mengecil dari Rp 89,2 triliun pada tahun lalu menjadi tinggal Rp 59,3 triliun dalam APBN 2006—setelah ditambah sisa anggaran tahun sebelumnya Rp 5 triliun. Tingkat konsumsi pun bisa sedikit ditekan karena masyarakat terpaksa berhemat dengan harga bahan bakar yang lebih mahal.

Dalam kalkulasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan harga itu bahkan bisa menekan defisit anggaran. Kalau harga minyak rata-rata US\$ 60 per barel, defisit diperkirakan mencapai Rp 40 triliun. Bila harganya melejit ke US\$ 70 per barel, defisit akan turun menjadi

Rp 32,4 triliun.

Tapi, sekadar untung "lumayan" saja tak cukup memuaskan. Pemerintah masih menganggap perilaku konsumsi minyak kita saat ini kelewat boros, terutama pada tingginya konsumsi minyak tanah, yang memakan porsi Rp 31 triliun anggaran subsidi tahun ini.

Dibanding minyak tanah, yang di tingkat konsumen akhir berkisar Rp 3.000 per liter (dari patokan pemerintah Rp 2.500), harga eceran elpiji di pasaran memang lebih mahal, yakni Rp 5.100 (dari harga resmi Rp 4.250). Tapi, jika diukur dari besarnya kalori yang dihasilkan kedua bahan bakar itu, ternyata pemakaian elpiji jauh lebih efisien (*lihat tabel*).

Masalahnya, mengubah kebiasaan masyarakat yang puluhan tahun akrab dengan minyak tanah jelas tak mudah. Setelah tabung dan kompor disubsidi pun, sebagian masyarakat tak mampu tetap akan kesulitan bila harga gas cair ini tetap seperti sekarang.

Selama ini rumah tangga golongan miskin masih sedikit tertolong karena bisa membeli minyak tanah eceran per liter. Tapi, untuk elpiji, satuan terkecil

akan disediakan dengan tabung subsidi ukuran 3 kilogram, yang harganya setara dengan 5 liter minyak tanah.

Menurut data Badan Pusat Statistik, konsumen dari kelas sangat miskin sebanyak 10 persen dari konsumsi nasional yang mencapai 11,38 miliar liter per tahun. Komposisi konsumen lainnya adalah: 20 persen dari golongan miskin, 50 persen menengah, dan hanya 20 persen yang dari kelompok mampu.

"Karena itu, kami merekomendasikan, sebaiknya dicoba dulu di empat kota," kata juru bicara Pertamina, M. Harun. "Paling tidak, kalangan menengah dan

kelompok mampu dulu," kata Erie Soedarmo, Direktur Pengolahan dan Niaga Minyak dan Gas di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk Jakarta, dengan konsumsi minyak tanah 972 juta liter per tahun, 9 persennya bisa mulai dialihkan tahun ini. Pada saat yang sama, pengalihan sepenuhnya sudah bisa diupayakan untuk Batam, yang mengkonsumsi 93 juta liter per tahun. Tahun berikutnya, pengenalan bergerak ke Bali dan Makassar. Dan pada akhir 2009, minyak tanah sepenuhnya tak akan lagi beredar di empat kota ini.

Y. Tomi Aryanto, Maruli Ferdinand

Perbandingan Minyak Tanah dan LPG

| Perbandingan | Minyak tanah | LPG |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Kesetaraan | 1 liter | 0,57 kilogram |
| Total potensi konsumsi* | 11,38 juta kiloliter/tahun | 6,54 metrik ton/tahun |
| Harga tanpa subsidi** | Rp 5.665/liter | Rp 7.093/kilogram |
| Harga jual ke masyarakat | Rp 2.500/liter | Rp 4.250/kilogram |
| Besar subsidi | Rp 3.165/liter | Rp 2.843/kilogram |
| Total subsidi*** | Rp 36,03 triliun/tahun | Rp 18,6 triliun/tahun |

PENGHEMATAN SUBSIDI: Rp 17,44 triliun/tahun

*) DATA PENJUALAN MINYAK TANAH 2005.

**PUBLIKASI PT PERTAMINA, HARGA MINYAK TANAH NON-SUBSIDI PER MEI 2006.

***DALAM APBN 2006 TERSEDIA RP 59,3 TRILIUN UNTUK SELURUH BBM. MINYAK TANAH MEMAKAN PORSI RP 31 TRILIUN.

Sumber: Pertamina

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 82

■ Minyak

TAHUN 2006

Saatnya Berbagi Adil

Polisi memburu para pengilang minyak tradisional di Bojonegoro. Sekadar bertahan hidup.

LANGIT Wonokromo kembali lengang. Tak lagi asap mengepul dari kilang-kilang minyak tradisional, yang sejak dua bulan lalu menjamur di kawasan pegunungan di Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur itu. Polisi rupanya telah meringkus para penyuling tradisional di sana.

Sedikitnya lima orang ditahan, pekan lalu. Mereka adalah Baula (25 tahun), Sholeh (41), Suhadi (37), Bahno (24), dan Joni Sumaryono (55). Namun belakangan mereka dilepas karena tak cukup bukti. Yang ditahan tinggalah Kasmidjan, 52 tahun, yang hingga kini masih berstatus tersangka.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas, kegiatan penyulingan tradisional memang terlarang. Meski begitu, aksi diam-diam mengilang sendiri minyak mentah, yang di Bojonegoro disebut *latung*, sudah berjalan dua bulan.

Mereka menggali dan membuat gundukan-gundukan tanah. Di dalamnya, terkubur drum berkapasitas 200 liter, yang terhubung dengan pipa bergaris tengah lima sentimeter menuju sebuah bejana lain. Drum juga tersambung ke bejana pendingin, agar tidak meledak.

Drum ini berisi penuh minyak tanah, yang berfungsi sebagai tungku. Penyulingan dilakukan dengan cara mendidihkan drum tadi, dengan kayu sebagai bahan bakar. Proses pengilangan sederhana ini kira-kira makan waktu empat jam.

Persoalan muncul ketika setoran minyak mentah dari Koperasi Unit Desa Bogo Sasono ke PT Pertamina Cepu terasa mulai seret. Jumlah setoran, yang biasanya mencapai 11-12 rit tangki (per tangki berisi 5.000 liter) turun menjadi 7, bahkan 6 rit per hari.

Dalam hal pengumpulan minyak ini, antara Pertamina dan KUD Bogo Sasono memang telah terjalin kesepakatan kontrak. Untuk kebutuhan pasokan itu, koperasi selama ini menampung minyak hasil tambang rakyat di tiga desa: Wonocolo (222 sumur), Hargomulyo (138), dan Beji (26).

Dari jumlah itu, yang kini beroperasi baru 48 sumur dengan kapasitas produksi 50-60 ribu liter per hari. Namun belakangan paso-

kan tak lagi lancar karena para penambang memilih menyuling sendiri minyaknya. "Kami ditegur Pertamina Cepu," kata Zaenuri, Ketua KUD Bogo Sasono. Untuk memeranginya, ia pun melaporkan kasus ini ke polisi.

Para penambang beralih, kegiatan terlarang itu terpaksa dilakukan karena harga jual minyak ke Pertamina, yang disebut imbal jasa atau upah pengambilan minyak mentah, sangat rendah. Para penambang hanya mendapat imbalan jasa Rp 47 ribu per drum. Jika minyak itu disuling sendiri, keuntungannya berlipat ganda.

Dari satu drum minyak mentah bisa dihasilkan 100 liter bahan bakar minyak campuran solar dan minyak tanah. Minyak ini dijual ke nelayan Tuban dan Rembang seharga Rp 2.200 per liter. "Ini pun sekadar untuk makan, kok," kata Sholeh ketika ditemui *Tempo*.

Dari segi penghasilan, kehidupan para penambang tradisional terbilang pas-pasan. Sihkaton, 54 tahun, yang tinggal di Desa Kedewan, harus berjalan kaki 8 kilometer pulang-pergi dari rumahnya ke sumur tempatnya bekerja. Sumur ini ia garap bersama 15 anggota kelompok. Penghasilannya tak menentu, terkadang hanya mendapat upah Rp 100 ribu selama sepekan.

Besarnya upah tergantung seberapa banyak minyak yang ditambang. Tak jarang pula minyak di dasar sumur berkedalaman 200-500 meter itu tak menyembur deras. Padahal ia harus menghidupi istri dan empat anaknya. "Weteng tukang tambang sakniki lempet. Mangan mawon mboten wareg (Perut penambang sekarang lengket. Makan saja tak kenyang)," katanya.

Beban hidup para penambang kian berat, karena seluruh biaya operasional juga menjadi tanggungan mereka. Sakim, 44 tahun, yang punya satu sumur, termasuk yang merasakan itu. "Saya pompa sejak tiga tahun lalu, tapi yang keluar bukan minyak. Hanya air dan lumpur," ujarnya.

Wonocolo sesungguhnya pernah makmur. Namun, sejak keluar peraturan pemerintah pada 1987, yang membatasi penambangan rakyat dan penjualan minyak secara bebas, kemiskinan menjamah setiap sudut desa.

Karena itulah Syarif Usman, anggota DPRD Bojonegoro, meminta penambang tradisional diperlakukan secara adil. "Toh, mereka pun selama ini mencari sendiri jejak sumur peninggalan Belanda, dan membiayai sendiri seluruh ongkos produksinya," ujarnya.

Sunudyantoro (Bojonegoro)

45

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MET** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: |

TAHUN 2006



Bus Berbahan Bakar Gas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Istri didampingi Gubernur DKI Sutiyoso dan beberapa menteri naik bus jalur khusus (*busway*) di Jakarta kemarin. Presiden mencanangkan gerakan pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor. Bahan bakar ini belum diminati pengguna kendaraan bermotor karena ketersediaan stasiun pengisian di Jakarta masih sangat jarang. Pemerintah DKI Jakarta mengharuskan setiap pompa bensin menyediakan bahan bakar gas.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2006

SBY Minta Jaminan Keamanan Penggunaan BBG

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pemprov DKI Jakarta mempermudah masyarakat memperoleh bahan bakar gas (BBG) untuk mewujudkan penghematan energi.

Selain itu, SBY mengimbau Pemprov DKI memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pengguna BBG. Ia menilai, penggunaan gas merupakan solusi efektif akibat menipisnya minyak bumi. "Pengembangan BBG untuk transportasi merupakan revitalisasi program langit biru," katanya saat meresmikan sosialisasi BBG untuk kendaraan bermotor, Sabtu (20/5) di halaman parkir busway koridor II, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Sutiyoso menambahkan, pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Jakarta telah diamankan dalam

Perda No. 2/2005 dan Pergub No. 75/2005.

Dikatakan, tingkat polusi udara di Jakarta 70 persen diakibatkan kendaraan bermotor, 20 persen oleh industri dan sisanya 10 persen oleh sumber polutan lain. Untuk itu, permasalahan merupakan adalah solusi terbaik, selain menggiatkan penghijauan.

"Kita akan terapkan BBG pada semua kendaraan operasional Pemprov DKI serta angkutan umum seperti mikrolet, bajaj, bus kota, dan taksi secara bertahap," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur menginstruksikan agar seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Ibu Kota menyediakan fasilitas pengisian bahan bakar gas (BBG). ■ SRF

47

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **M** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 **22** 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2006



BIOSOLAR:

Meneg. BUMH
Sugiharto (KRI), Menteri
ESDM Purnomo
Yusgiantoro (Kedua dari
KRI), Menristek/Kepala
BPP, Kadiman dan
Dirut Pertamina Ari H.
Soemarno saat pelun-
curan Biosolar
Pertamina di Jakarta,
Sabtu (20/5).

48

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MIGAS JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 19

TAHUN 2006

Gas Elpiji di Madiun Langka

BAHAN bakar jenis gas di Kota Madiun, Jawa Timur (Jatim), sudah enam bulan terakhir langka. Pengecer gas elpiji, Bambang, 45, mengatakan sejak Desember tahun lalu hingga bulan ini tokonya di Jalan Klegan, Mojorejo, Madiun, hanya mendapat pasokan lima tabung gas setiap pekan. Padahal, biasanya Toko Seri Dewi miliknya mendapat pasokan elpiji 35 tabung kecil setiap pekan. Bagian pemasaran diler elpiji PT Cahaya Terang Satata Nenus, 35, mengakui dalam beberapa bulan terakhir gas elpiji langka. "Baru sejak Rabu (17/5) dapat pasokan secara teratur," katanya, kemarin. (AG/N-4)

49